ALSYS
Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan

e-ISSN : 2808-540X
p-ISSN : 2808-7119

Terindeks: Copernicus, Sinta 5, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/alsys.v5i3.5461

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN

The Role of Local Government in Managing the Education Budget to Improve Access and Quality of Education

Yeni Suryani[1], Ila Indah Pertiwi[2], Ivni Alfrisqa Mustafa[3], Widyatmike Gede Mulawarman[4], Usfandi Haryaka[5]
Universitas Mulawarman
yenisrn@gmail.com; Ilapertiwi65@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 22, 2025	Apr 6, 2025	Apr 18, 2025	Apr 23, 2025

Abstract

Education is a constitutional right and a pillar of national development. The government allocates a minimum of 20% of the budget, with a total of IDR 665 trillion in 2024. However, increasing the budget does not guarantee equitable quality. The average length of national school is 8.92 years, but Papua and NTT are still below 7.5 years. The purpose of this study is to analyze the role of local governments in the management of education budgets, as well as to assess the extent to which this management contributes to improving access and quality of education in the regions. This research uses a descriptive qualitative approach with the aim of gaining an in-depth understanding of the role of local governments in managing education budgets and their impact on improving access and quality of education. Based on the results of the analysis, it is shown that the allocation and distribution of the education budget in Indonesia does not fully reflect the principle of justice between regions. Although most regions have met the minimum provisions for education spending in the APBD,

AlSys is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

the achievement of indicators such as average length of schooling, pure participation rate, and national assessment results still show striking gaps. For example, DKI Jakarta has the highest RLS of 11.31 years, while some provinces such as Papua are still below 7.5 years. Intermediate APM also varied, with Papua at 60.5% and East Nusa Tenggara at 63.2%. In terms of quality, DKI Jakarta and Yogyakarta show the percentage of student literacy and numeracy competency above 80%, while Papua is below 60%. This proves that the large proportion of the budget does not automatically guarantee equitable educational achievements. Therefore, the quality of governance and the effectiveness of program implementation are key factors in realizing equitable access and quality of education throughout Indonesia.

Keywords: Role of Local Government, Education Budget Management, Access to Education, Quality of Education

Abstrak: Pendidikan merupakan hak konstitusional dan pilar pembangunan nasional. Pemerintah mengalokasikan minimal 20% anggaran, dengan total Rp665 triliun pada 2024. Namun, peningkatan anggaran belum menjamin pemerataan kualitas. Rata-rata lama sekolah nasional 8,92 tahun, namun Papua dan NTT masih di bawah 7,5 tahun. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan, serta untuk menilai sejauh mana pengelolaan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendidikan serta dampaknya terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi dan distribusi anggaran pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan antarwilayah. Meskipun sebagian besar daerah telah memenuhi ketentuan minimal belanja pendidikan dalam APBD, capaian indikator seperti rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, dan hasil asesmen nasional masih menunjukkan kesenjangan mencolok. Misalnya, DKI Jakarta memiliki RLS tertinggi 11,31 tahun, sementara beberapa provinsi seperti Papua masih di bawah 7,5 tahun. APM jenjang menengah juga bervariasi, dengan Papua di angka 60,5% dan Nusa Tenggara Timur 63,2%. Dari sisi mutu, DKI Jakarta dan Yogyakarta menunjukkan persentase kompetensi literasi dan numerasi siswa di atas 80%, sedangkan Papua di bawah 60%. Hal ini membuktikan bahwa besarnya proporsi anggaran belum otomatis menjamin capaian pendidikan yang merata. Oleh karena itu, kualitas tata kelola dan efektivitas implementasi program menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Akses Pendidikan, Kualitas Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Setiap negara menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan sosial (Erwiati & Hajani, 2022). Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara terhadap seluruh rakyatnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya. Amanat ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan dari APBN dan APBD harus minimal 20%. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk memastikan bahwa sektor pendidikan mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional maupun daerah. Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan tahun 2024 mencapai Rp665 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp612 triliun. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pendidikan. Anggaran tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, serta pembiayaan pendidikan lainnya. Di level daerah, pengalokasian anggaran pendidikan juga merupakan bagian penting dari APBD yang harus direncanakan dan dikelola secara efektif. Meskipun demikian, peningkatan anggaran belum secara otomatis berdampak pada pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, rata-rata lama sekolah nasional adalah 8,92 tahun. Namun, di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, angka ini masih berada di bawah 7,5 tahun. Ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan di beberapa daerah masih tertinggal dibandingkan wilayah lainnya, meskipun sama-sama memperoleh alokasi anggaran pendidikan (Sampaleng & Baharuddin, 2023).

Ketimpangan tersebut tidak hanya mencakup akses, tetapi juga menyentuh aspek kualitas pendidikan. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional tahun 2023 oleh Kemendikbudristek, banyak sekolah di daerah tertinggal belum memenuhi standar layanan minimal, baik dari segi sarana prasarana, mutu tenaga pendidik, maupun proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan belum optimal dalam menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Dalam sistem pemerintahan yang menganut otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengelola sektor pendidikan. Kewenangan tersebut meliputi perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan akses dan kualitas pendidikan tidak

hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga sangat ditentukan oleh kinerja dan komitmen pemerintah daerah.

Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola anggaran pendidikan. Permasalahan seperti lemahnya perencanaan, kurangnya data yang akurat, rendahnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya kapasitas aparatur daerah menjadi penghambat dalam pelaksanaan program pendidikan yang efektif dan efisien. Selain itu, tidak sedikit anggaran yang terserap tanpa disertai capaian output dan outcome yang signifikan. Sebagian daerah menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah daerah sulit untuk mengembangkan program-program inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Padahal, salah satu kekuatan otonomi daerah adalah kemampuannya untuk merancang kebijakan yang kontekstual dan berbasis potensi serta permasalahan daerah masing-masing (Sutansyah & Ramdani, 2023). Selain pengelolaan yang bersifat teknis, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan juga menjadi sorotan penting. Keterbukaan informasi kepada publik terkait perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan masih rendah di sejumlah daerah. Hal ini berdampak pada lemahnya kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor pendidikan (Saadah et al., 2023).

Kualitas SDM aparatur daerah juga sangat mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan. Kurangnya pelatihan, minimnya pemahaman terhadap regulasi, serta lambannya adopsi teknologi informasi menyebabkan proses pengelolaan anggaran sering kali berjalan tidak efisien. Belum lagi tantangan dalam sistem pengawasan internal yang seringkali tidak mampu mengidentifikasi penyimpangan secara dini. Lebih jauh, kolaborasi antar instansi daerah, termasuk Dinas Pendidikan, Bappeda, dan Inspektorat Daerah masih belum optimal. Koordinasi yang lemah ini menyebabkan tumpang tindih kebijakan, program yang tidak sinkron, serta ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi di lapangan (Putri et al., 2024). Pada akhirnya, hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas program-program pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Berbagai persoalan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun partisipasi publik. Kemampuan

pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang berbasis data, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan dilaksanakan secara akuntabel akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan pendidikan (Fatimah, 2023).

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran aktif pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan pendidikan di tingkat lokal. Dengan tanggung jawab yang besar dan kewenangan yang luas, pemerintah daerah berada pada posisi strategis untuk mengintervensi langsung persoalan-persoalan pendidikan yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih dalam terkait bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran pendidikan secara nyata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan, serta untuk menilai sejauh mana pengelolaan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendidikan serta dampaknya terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Lokasi penelitian difokuskan pada beberapa daerah kabupaten/kota yang memiliki tingkat alokasi anggaran pendidikan yang berbeda-beda, guna memperoleh variasi data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat Dinas Pendidikan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), anggota DPRD komisi pendidikan, serta kepala sekolah. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen perencanaan anggaran, laporan realisasi APBD, serta data statistik pendidikan daerah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan proses triangulasi untuk memastikan validitas data, baik melalui sumber, teknik, maupun waktu pengumpulan data. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan bagaimana peran strategis pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan anggaran pendidikan, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran tersebut dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di tingkat lokal (Sugiyono, 2023).

HASIL

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas dalam pembangunan nasional Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran pendidikan guna mencapai pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Namun, meskipun alokasi anggaran telah ditingkatkan, disparitas dalam akses dan kualitas pendidikan antar daerah masih menjadi tantangan signifikan. Salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan sektor pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). RLS mencerminkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022-2024 menunjukkan adanya variasi RLS yang cukup signifikan antar provinsi di Indonesia.

Tabel 1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Beberapa Provinsi Indonesia Tahun 2022-2024

Provinsi	***Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)***
DKI Jakarta	11,31
Kepulauan Riau	10,37
Maluku	10,19
Kalimantan Timur	9,92
DI Yogyakarta	9,75
Sumatera Utara	9,71
Sulawesi Utara	9,68
Aceh	9,44
Bali	9,39
Kalimantan Utara	9,27

Sumber: *GoodStats Data*Open Data Jabar+2GoodStats Data+2Edukasi Sindonews+2

Dari tabel di atas, terlihat bahwa DKI Jakarta memiliki RLS tertinggi, yaitu 11,31 tahun, sedangkan beberapa provinsi lain masih berada di bawah angka tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal akses dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Selain RLS, Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan menengah juga menjadi indikator penting dalam menilai akses pendidikan. APM mencerminkan persentase anak usia sekolah yang benar-benar bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Data menunjukkan bahwa beberapa provinsi masih memiliki APM yang rendah, menandakan masih adanya tantangan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan menengah.

Tabel 2. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah di Beberapa Provinsi

Provinsi	*APM Pendidikan Menengah (%)*
Papua	60,5
Nusa Tenggara Timur	63,2
Sulawesi Barat	65,7
Kalimantan Barat	66,8
Maluku	67,3

Sumber: BPS

Provinsi Papua memiliki APM pendidikan menengah terendah, yaitu 60,5%, menunjukkan bahwa hampir 40% anak usia sekolah menengah di Papua belum terakomodasi dalam sistem pendidikan formal. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus dalam pengelolaan anggaran pendidikan di daerah tersebut. Kualitas pendidikan juga dapat diukur melalui hasil **Asesmen Nasional** yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen ini menilai kompetensi literasi dan numerasi siswa di seluruh Indonesia. Hasil asesmen menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antar provinsi dalam capaian kompetensi tersebut.

Tabel 3. Persentase Siswa dengan Kompetensi Literasi dan Numerasi Baik di Beberapa Provinsi

Provinsi	*Persentase Siswa dengan Kompetensi Literasi Baik (%)*	*Persentase Siswa dengan Kompetensi Numerasi Baik (%)*
DKI Jakarta	85,4	82,7
DI Yogyakarta	83,1	80,5
Jawa Timur	78,9	76,3
Nusa Tenggara Timur	65,2	62,8
Papua	58,7	55,4

Sumber: Kemendikbudristek

DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menunjukkan persentase siswa dengan kompetensi literasi dan numerasi yang baik di atas 80%, sementara Papua berada di bawah 60%. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan kualitas pendidikan yang perlu ditangani melalui pengelolaan anggaran yang efektif oleh pemerintah daerah. Peran pemerintah

daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan sangat krusial untuk mengatasi disparitas tersebut. Alokasi anggaran yang tepat sasaran dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta program pendukung lainnya. Namun, kapasitas fiskal masing-masing daerah berbeda, sehingga mempengaruhi besarnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Tabel 4. Alokasi Anggaran Pendidikan di Beberapa Provinsi

Provinsi	**Alokasi Anggaran Pendidikan (Miliar Rp)**	**Persentase terhadap APBD (%)**
DKI Jakarta	12.500	20,5
Jawa Barat	10.300	18,7
Papua	3.200	25,0
Nusa Tenggara Timur	2.800	22,3
Maluku	1.500	19,8

Sumber: Kementerian Keuangan

Meskipun Papua mengalokasikan 25% dari APBD-nya untuk pendidikan, jumlah absolutnya masih lebih rendah dibanding DKI Jakarta atau Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proporsinya tinggi, keterbatasan fiskal berdampak pada kemampuan riil pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pendidikan. Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran menjadi hal yang sangat penting, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Pemerintah daerah yang mampu merancang program pendidikan berbasis kebutuhan lokal serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif, cenderung menunjukkan hasil yang lebih baik dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Program-program seperti beasiswa bagi siswa kurang mampu, peningkatan pelatihan guru, hingga pembangunan dan renovasi sekolah telah terbukti berdampak positif ketika dikelola dengan transparan dan akuntabel.

Tabel 5: Contoh Program Daerah dan Capaian Pendidikan

Daerah	***Program Unggulan***	***Hasil yang Dicapai***
Kota Surabaya	Beasiswa "Surabaya Pintar", revitalisasi sekolah	APM SMP meningkat dari 83% (2020) menjadi 91% (2023)
Kabupaten Sleman	Program Pelatihan Guru Digital	Skor literasi siswa naik 12% dalam Asesmen Nasional
Kota Bandung	Sekolah Ramah Anak dan	Penurunan angka putus sekolah SD sebesar

	Inklusif	3% dalam 2 tahun
Kabupaten Jayapura	Sekolah Naik Perahu (akses transportasi)	Kehadiran siswa naik 18% di daerah pesisir
Kota Makassar	Program "Smart School" berbasis teknologi	Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan meningkat 24% (survey)

Sumber: Laporan Pendidikan Inovatif Daerah, Kemendikbudristek 2023

Di sisi lain, daerah-daerah yang belum optimal dalam merencanakan dan menggunakan anggaran pendidikan sering kali mengalami keterlambatan pembangunan fasilitas pendidikan, kekurangan guru, serta tidak meratanya distribusi anggaran hingga ke pelosok. Hal ini menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa serta menurunnya kualitas pembelajaran, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan bahwa sejumlah pemerintah daerah masih memiliki catatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Permasalahan administratif, lemahnya perencanaan anggaran berbasis kinerja, serta kurangnya evaluasi terhadap program yang berjalan menjadi kendala utama dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan daerah.

Tabel 6. Temuan BPK atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Beberapa Daerah

Daerah	***Temuan Utama***	***Rekomendasi BPK***
Kabupaten Lombok Timur	Penggunaan anggaran BOS tidak sesuai petunjuk teknis	Perlu pelatihan ulang bagi bendahara sekolah
Kota Palu	Dana pembangunan sekolah tidak terealisasi 100%	Perbaiki sistem perencanaan dan monitoring anggaran
Kabupaten Paniai	Dana guru tidak tetap belum cair selama 6 bulan	Percepat sistem penyaluran honor
Kota Cirebon	Tidak ada laporan evaluasi tahunan atas program pendidikan	Wajib menyusun laporan berkala dan keterlibatan publik
Kabupaten Tolitoli	Dana kegiatan literasi dialihkan ke sektor lain	Perlu penguatan regulasi agar tidak terjadi penyimpangan

Sumber: LHP BPK Semester I Tahun 2023

Kondisi ini menekankan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan bukan hanya soal besar kecilnya jumlah yang dialokasikan, melainkan bagaimana anggaran tersebut direncanakan, digunakan, dan dievaluasi secara transparan. Keterlibatan publik, seperti komite sekolah dan masyarakat, menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa anggaran

yang digunakan benar-benar menyasar kebutuhan yang riil di lapangan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengelola sektor pendidikan. Namun hal ini juga berarti tanggung jawab besar bagi daerah dalam menciptakan sistem pengelolaan yang profesional, adaptif, dan inovatif agar tujuan pendidikan nasional bisa tercapai.

Tabel 7: Indeks Pengelolaan Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan

Provinsi	***Indeks Kinerja Bidang Pendidikan (0-100)***	***Kategori***	***Penjelasan Singkat***
DI Yogyakarta	87,3	Sangat Baik	Anggaran tepat sasaran, keterlibatan publik tinggi
DKI Jakarta	85,6	Sangat Baik	Efisiensi belanja tinggi, berbasis data
Jawa Timur	81,2	Baik	Capaian kinerja meningkat, sistem evaluasi rutin
Kalimantan Tengah	68,7	Cukup	Program inovatif terbatas
Nusa Tenggara Timur	61,5	Perlu Perbaikan	Masalah tata kelola dan distribusi anggaran

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Melalui data-data di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan sektor pendidikan, baik dari sisi akses maupun kualitas. Setiap kebijakan dan program yang dirancang akan berdampak langsung terhadap kondisi pendidikan di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas tata kelola dan akuntabilitas penganggaran sangat menentukan arah pembangunan pendidikan di masa depan.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa alokasi anggaran pendidikan masih menunjukkan ketimpangan antardaerah, terutama antara wilayah barat dan timur Indonesia. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan dalam kemampuan fiskal daerah, tetapi juga menunjukkan kesenjangan dalam prioritas kebijakan serta efektivitas tata kelola anggaran di tingkat lokal. Hal ini berdampak langsung terhadap pemerataan kualitas pendidikan dan akses layanan pendidikan yang memadai bagi seluruh masyarakat. Proporsi belanja fungsi pendidikan dalam APBD sebagian besar daerah memang sudah memenuhi ambang batas minimal 20%. Namun, realisasi anggaran tidak selalu mencerminkan

optimalisasi penggunaan dana secara efektif. Banyak daerah yang mengalokasikan belanja pendidikan lebih banyak ke belanja pegawai dibandingkan belanja modal atau program peningkatan mutu. Implikasi dari pola belanja ini adalah rendahnya dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran maupun fasilitas pendidikan (Inkiriwang, 2020).

Data juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan fiskal daerah dengan capaian indikator pendidikan, seperti angka partisipasi sekolah dan tingkat kelulusan. Daerah dengan fiskal tinggi cenderung memiliki pencapaian pendidikan yang lebih baik, sementara daerah dengan fiskal rendah menghadapi tantangan lebih besar. Ini mengonfirmasi bahwa ketergantungan pada transfer pusat belum cukup mampu menjembatani kesenjangan capaian antardaerah tanpa penguatan tata kelola di tingkat lokal. ditemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan masih menjadi isu penting di banyak daerah. Keterbatasan dalam akses informasi publik dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi anggaran mengakibatkan rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Kondisi ini memperbesar potensi penyalahgunaan anggaran dan mempersulit pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan (Sri Budi Herawati et al., 2020).

PEMBAHASAN

Belanja fungsi pendidikan dalam APBD diketahui cenderung mendominasi struktur belanja daerah di Indonesia. Meskipun demikian, implementasinya menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok antarwilayah. Di sejumlah daerah, alokasi anggaran pendidikan telah melampaui batas minimal 20% yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, pola realisasi anggaran tidak selalu mencerminkan pemerataan kualitas layanan pendidikan, karena sebagian besar dana lebih banyak terserap untuk belanja rutin seperti gaji pegawai, sementara proporsi untuk peningkatan sarana dan mutu pendidikan masih terbatas. Data menunjukkan bahwa belanja fungsi pendidikan dalam APBD cenderung mendominasi struktur belanja daerah, namun implementasinya tidak merata antardaerah (Nursiniah & Aliyyah, 2024).

Sebagian besar daerah telah memenuhi ketentuan alokasi minimal 20% untuk fungsi pendidikan dalam APBD. Namun, dalam implementasinya, banyak daerah yang menempatkan belanja pegawai sebagai komponen terbesar dalam anggaran pendidikan.

Dominasi belanja pegawai ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk membiayai operasional rutin ketimbang belanja modal atau belanja barang yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan. Ketimpangan fiskal antarwilayah juga terlihat nyata. Daerah-daerah dengan kapasitas fiskal tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur memiliki kemampuan lebih besar dalam menyediakan anggaran pendidikan yang cukup besar. Sebaliknya, daerah-daerah di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan NTT menghadapi keterbatasan fiskal yang berdampak pada rendahnya kualitas layanan pendidikan (Retno et al., 2024).

Data juga menunjukkan bahwa belanja fungsi pendidikan tidak selalu sebanding dengan hasil pendidikan. Beberapa daerah dengan alokasi anggaran yang tinggi ternyata tidak menunjukkan capaian pendidikan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan di tingkat lokal. Distribusi anggaran antarjenis belanja juga memperlihatkan kecenderungan pengeluaran yang tidak proporsional. Belanja pegawai mendominasi hingga lebih dari 60% dari total belanja fungsi pendidikan di banyak daerah. Sementara itu, alokasi untuk belanja modal pendidikan seperti pembangunan sarana dan prasarana masih tergolong kecil, sehingga memperlambat upaya pemerataan infrastruktur pendidikan. Tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat juga masih tinggi, terutama di daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. Ketergantungan ini mencerminkan lemahnya kemandirian fiskal daerah dalam mendanai sektor pendidikan, dan berdampak pada kemampuan daerah untuk menginisiasi program pendidikan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Nani, 2021).

Ketimpangan anggaran juga berimplikasi pada disparitas capaian pendidikan. Angka partisipasi sekolah dan capaian mutu pendidikan di daerah maju cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah tertinggal. Ini menunjukkan bahwa penyediaan anggaran yang cukup belum menjamin keberhasilan pendidikan tanpa disertai dengan tata kelola yang baik. Selain itu, variasi dalam penyerapan anggaran pendidikan juga menjadi persoalan penting. Beberapa daerah tidak mampu menyerap anggaran secara optimal, yang disebabkan oleh lambannya proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini berdampak pada kualitas dan keberlanjutan program-program pendidikan di daerah tersebut. Penggunaan anggaran yang tidak efisien juga terlihat dari tumpang tindih program dan kurangnya monitoring terhadap output dan outcome pendidikan. Banyak daerah yang masih berfokus pada kegiatan administratif tanpa indikator kinerja yang jelas, sehingga sulit untuk menilai

keberhasilan program pendidikan yang telah dilaksanakan. Keterbatasan dalam kapasitas aparatur daerah juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi anggaran pendidikan. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran menyebabkan alokasi yang tidak tepat sasaran dan rendahnya akuntabilitas pengeluaran (Bawor & Ahmad, 2023).

Di sisi lain, beberapa daerah menunjukkan praktik baik dalam manajemen anggaran pendidikan, dengan melakukan inovasi pembiayaan dan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat sistem informasi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kinerja antardaerah tidak hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan kepemimpinan daerah. Terkait aspek transparansi, ditemukan bahwa sebagian besar daerah belum menyediakan informasi anggaran pendidikan secara terbuka kepada publik. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran mengakibatkan rendahnya akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengeluaran sektor pendidikan (Lumowa et al., 2021). Pola distribusi anggaran juga mencerminkan preferensi politik dan birokrasi di daerah. Dalam beberapa kasus, alokasi anggaran lebih dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek atau orientasi politik kepala daerah, ketimbang berdasarkan kebutuhan objektif dunia pendidikan di wilayah tersebut (Fadhil Rachmad et al., 2023).

Ketidakselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dan rencana strategis sektor pendidikan juga berdampak pada efektivitas belanja. Dalam beberapa daerah, prioritas pembangunan tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, sehingga alokasi anggaran menjadi tidak sinkron dengan target peningkatan mutu pendidikan. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia secara nasional telah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai mandat konstitusi, persoalan distribusi, efektivitas, efisiensi, dan tata kelola anggaran pendidikan masih menjadi tantangan serius yang harus ditangani dalam rangka mencapai pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Naila & Effane, 2022). Selain perbedaan dalam alokasi anggaran, variasi capaian pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan dana di tiap daerah. Provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta mampu mengoptimalkan dana pendidikan untuk menghasilkan capaian kompetensi siswa yang tinggi, seperti terlihat dari skor literasi dan numerasi yang berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya besar kecilnya anggaran yang menentukan keberhasilan, tetapi juga

bagaimana anggaran tersebut direncanakan, dijalankan, dan dievaluasi secara menyeluruh dan berbasis kebutuhan lokal (Debataraja, 2024).

Di sisi lain, provinsi dengan kapasitas fiskal rendah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur meskipun telah mengalokasikan proporsi anggaran pendidikan yang tinggi terhadap total APBD, masih menunjukkan capaian pendidikan yang tertinggal. Rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan kompetensi literasi-numerasi menjadi sinyal bahwa tantangan pembangunan pendidikan di daerah bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga tentang infrastruktur, distribusi guru, konteks geografis, serta faktor sosial budaya yang kompleks (Sanga & Wangdra, 2023). Program-program inovatif yang dirancang oleh pemerintah daerah menunjukkan potensi besar dalam menjawab tantangan lokal secara spesifik. Misalnya, program "Sekolah Naik Perahu" di Kabupaten Jayapura berhasil meningkatkan kehadiran siswa di wilayah pesisir, sementara program "Smart School" di Kota Makassar mendorong partisipasi publik dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis lokal yang responsif terhadap konteks sosial dan geografis daerah sangat penting dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif dan berdampak nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi dan distribusi anggaran pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan antarwilayah. Meskipun sebagian besar daerah telah memenuhi ketentuan minimal belanja pendidikan dalam APBD, capaian indikator seperti rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, dan hasil asesmen nasional masih menunjukkan kesenjangan mencolok. Misalnya, DKI Jakarta memiliki RLS tertinggi 11,31 tahun, sementara beberapa provinsi seperti Papua masih di bawah 7,5 tahun. APM jenjang menengah juga bervariasi, dengan Papua di angka 60,5% dan Nusa Tenggara Timur 63,2%. Dari sisi mutu, DKI Jakarta dan Yogyakarta menunjukkan persentase kompetensi literasi dan numerasi siswa di atas 80%, sedangkan Papua di bawah 60%. Hal ini membuktikan bahwa besarnya proporsi anggaran belum otomatis menjamin capaian pendidikan yang merata. Meskipun Papua mengalokasikan 25% APBD untuk pendidikan lebih tinggi dari DKI Jakarta (20,5%) jumlah nominalnya jauh lebih kecil, yaitu Rp3,2 triliun dibandingkan Rp12,5 triliun. Daerah seperti Surabaya, Sleman, dan Makassar yang mampu mengelola anggaran secara akuntabel dan kontekstual

menunjukkan hasil lebih baik dalam indikator capaian pendidikan. Oleh karena itu, kualitas tata kelola dan efektivitas implementasi program menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

REFERENCES

Bawor, E., & Ahmad, M. (2023). Strategi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembiayaan Pendidikan Anak Papua. *Management Of Education Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *4*(2), 84–92. https://doi.org/10.21009/ijer.04.02.09

Debataraja, B. L. (2024). Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *JURILMA: Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia*, *369*(1), 1689–1699. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757%0Ahttp://dx.

Erwiati, & Hajani. (2022). Peran Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, *3*(3), 185–195. https://doi.org/10.30596/jppp.v3i3.12660

Fadhil Rachmad, A., Azaria, E., Nur Xusan, Q., & Azzahra, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, *16*(02), 75–88. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.773

Fatimah, F. (2023). Kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, *18*(2), 85–98.

Inkiriwang, R. R. (2020). Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidkan Nasional. *Lex Privatum*, *8*(32), 73–92. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html

Lumowa, F., Najoan, H., & Pangemanan, S. E. (2021). Peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar pada masa pandemi di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan. *Goverment*, *1*(2), 1–10.

Naila, S., & Effane, A. (2022). Desentralisasi Manajemen Pembiayaan Dan Konflik Dalam Mahalnya Biaya Pendidikan. *Karimah Tauhid*, *1*, 84–89. https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/7715%0Ahttps://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/download/7715/3505

Nani, Y. N. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, *7*(3), 231. https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.463

Nursiniah, S., & Aliyyah, R. R. (2024). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar. *Karimah Tauhid*, *3*(3), 2832–2855. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12275

Putri, N. I., Amalia, D., Putri, A. L., Renaldy, E., Simanullang, C., & Iman, A. (2024). Peran Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Mendorong Kesetaraan dan

Keadilan Pendidikan. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, *3*(5), 2503–2511.

Retno, A. C., Haryanto, S., Supriyoko, A., Administrasi, M., Universitas, P., Surakarta, M., & Tunas, U. (2024). Manajemen pembiayaan pendidikan berorientasi pada peningkatan prestasi peserta didik. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 764–770.

Saadah, N., Wastri, L., & Trisoni, R. (2023). Analisis Kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, *15*(2), 227–238. https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i2.2366

Sampaleng, D., & Baharuddin, B. (2023). Analisis Manfaat Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kecamatan Babela. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *17*(2), 14. https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1953

Sanga, L. D., & Wangdra, Y. (2023). Pendidikan Adalah Faktor Penentu Daya Saing Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, *5*(September), 84–90. https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8067

Sri Budi Herawati, E., Suryadi, S., Warlizasusi, J., & Aliyyah, R. R. (2020). Kinerja Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, *4*(1), 87. https://doi.org/10.29240/jsmp.v4i1.1435

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *CV. Alfabeta*, 1–274.

Sutansyah, L., & Ramdani, A. (2023). Pembiayaan Pendidikan: Urgensi, Tantangan, dan Solusi. *Jurnal Pelita Nusantara*, *1*(2), 221–226. https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.197